

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin di Jerman pada tahun 1990, sehingga interaksi antara negara-negara setelah berakhirnya perang pun semakin erat. Hal tersebut memunculkan ketergantungan antar negara yang menimbulkan hubungan kompleks. Sehingga, tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri. Terlebih ketika berubahnya sistem internasional yang semula berfokus pada kekuatan militer dan mengacu pada dua kekuatan besar, beralih pada banyaknya kekuatan, negara-negara di dunia yang mulai memunculkan semua potensinya di bidang lain, seperti ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan budaya. Dengan bergesernya pandangan tersebut mempengaruhi suatu negara untuk memperluas pengaruhnya di Dunia. (Finaldin & Agustina, 2019)

Dalam rangka memperluas pengaruhnya di Dunia Internasional, Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara “*super power*” atas kemenangannya terhadap Uni Soviet dalam perang ideologi, mencoba untuk membangun aliansi di Kawasan yang didalamnya terdapat ketegangan dan dinilai strategis untuk dijadikan aliansi bagi negara-negara *Super Power*. Negara-negara Islam di Kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah menjadi tujuan Amerika Serikat di karenakan ketegangan politik yang sering terjadi didalamnya. Namun, negara-negara Dunia Islam menolak keterlibatan Amerika Serikat dikarenakan memiliki hubungan yang erat dengan Israel.

Afghanistan salah satu negara yang menentang keras keterlibatan asing, disisi lain Afghanistan mengalami tantangan dalam menghadapi modernitas ideologi yang di miliknya dan perubahan struktur ideologi tersebut. Untuk itu, Amerika Serikat berinisiatif membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal tersebut terbukti pada tahun 1979 Uni Soviet mulai menginvasi ke Afghanistan, Amerika Serikat secara aktif dan tegas mendukung pejuang mujahidin dalam upayanya menghilangkan penyebaran komunis di Afghanistan, Akhirnya pada 1989 invasi Soviet pun berakhir dengan pengambil alihan koalisi mujahidin yang didukung Amerika Serikat di bawah kepemimpinan militer Ahmed Shah Massoud (Greelane, 2020).

Pada 11 September 2001 terjadi penyerangan terhadap gedung *World Trade Center* (WTC), terdapat empat pesawat menabrak gedung yang melambangkan kekuatan ekonomi, politik, dan militer Amerika Serikat. Serangan tersebut menewaskan 2.996 orang dan menjadi serangan terbesar yang pernah terjadi di Amerika Serikat (Ana Pais, 2021). Paska penyerangan *World Trade Center* (WTC) isu keamanan menjadi isu global, hal tersebut juga mempengaruhi Amerika Serikat dalam mengubah arah kebijakan luar negerinya dengan mendeklarasikan perang terhadap teroris atau yang dalam bahasa Inggris disebut *Global War on Terror*, kebijakan tersebut fokus terhadap isu keamanan negara. Kebijakan *Global War on Terror* (GWOT) menjadi legalitas Amerika Serikat menginisiasi gerakan melawan kelompok terror, kemudian dibawah kepemimpinan Bush, Amerika Serikat, mengeluarkan wacana “*either you are with us, or you are with the terrorist*” atau yang dikenal dengan “Doktrin Bush”. Pernyataan tersebutlah memaksa negara-negara lain untuk menentukan politik luar negeri untuk ada di pihak Bush atau teroris, Amerika Serikat pun menegaskan dalam National Security Strategy (NSS) bahwa akan memerangi tindakan terorisme dalam bentuk

apapun dan Amerika Serikat akan melakukan perlawanan serta menerapkan kebijakan WOT diseluruh dunia salah satunya adalah Afghanistan (Ni Wayan Ayu Suwari S. S., 2021). Dua pernyataan tersebutlah yang mengawali invasi Amerika Serikat di Afganistan, dinilai sebagai negara yang memantik terjadinya terorisme di Dunia, yang diawali dengan banyaknya gerakan oposisi yang dilakukan Taliban terhadap pemerintah Afghanistan, awal munculnya dan perkembangan organisasi terorisme internasional yang bernama Al-Qaeda. Oleh karena itu, Amerika Serikat perlu turun tangan dalam menyelesaikan konflik yang ada di Afghanistan. Selain itu, Amerika Serikat datang untuk memerangi Taliban, yaitu kelompok oposisi yang dianggap bertanggung jawab karena berusaha melindungi Osama bin Laden serta pengikutnya yaitu kelompok Al-Qaeda dalam aksi terorisme atas Amerika Serikat (Milia, 2015).

Invasi pertama Amerika Serikat terhadap Afghanistan adalah dengan meluncurkan operasi *Enduring Freedom Afghanistan (OEF-A)* pada 7 Oktober 2001, operasi tersebut mendapatkan dukungan oleh sekutunya seperti Northern Alliance, pasukan anti-taliban etnis Pashtun. Hasil dari operasi ini adalah Taliban kehilangan kota Mazar Sharif pada 9 November 2001. Amerika Serikat kemudian mengendalikan wilayah Kandahar dan beberapa wilayah lainnya seperti Taloqan, Bamiyan, Herat, Kabul dan Jalalabad. Operasi militer Amerika Serikat kemudian dilanjutkan dengan operasi Tora Bora pada Desember 2001. Amerika Serikat melanjutkan operasi militer pada tahun 2002 melalui operasi Anaconda. Operasi ini merupakan serangan darat terstruktur dan terbesar yang juga melibatkan sejumlah ANDFS. Jumlah pasukan pada operasi tersebut adalah hampir 2000 tentara Amerika Serikat dan 1000 tentara Afghanistan bertempur melawan 1000 kelompok militan yaitu Taliban dan Al-Qaeda. (Council on Foreign Relations, 2021).

Sejak Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, kebijakan terhadap Afghanistan pun tidak jauh berbeda dengan era Bush dalam memerangi terorisme. Dimana dalam strategi militer dan keamanan terhadap Afghanistan Obama akan tetap mengirim pasukan dan menambah jumlah pasukan militernya untuk menggulingkan kelompok Taliban, terlihat pada tahun 2009 menambah jumlah pasukan militer di Afghanistan sebanyak 68.000 (Council on Foreign Relations, 2021). Dan Obama menegaskan tujuan Amerika Serikat di Afghanistan untuk menolak tempat perlindungan bagi kelompok Al-Qaeda, terbukti dengan dikerahkan kekuatan intelijen seperti CIA untuk memburu Osama Bin Laden (Milia, 2015).

Pada 2 Mei 2011 dengan tewasnya Osamah bin Laden yaitu ketua organisasi Al-Qaeda yang diduga otak dari serangan 9/11 ditangan pasukan khusus Amerika Serikat di kediamannya mempengaruhi perubahan kebijakan Amerika Serikat selanjutnya di Afganistan. Dimana Amerika Serikat mengakhiri misi *Operation Enduring Freedom (OEF)* dan mengembangkan komitmennya melalui *Operation Freedom Sentinel (OFS)*. Operasi ini menerapkan misi lanjutan yaitu *counterterrorism* dan juga meningkatkan kualitas ANDFS dengan memberi pelatihan dan bantuan sosial. *Operation Freedom Sentinel (OFS)* berlangsung secara resmi dari tahun 2015 hingga 2024 melalui perjanjian *Bilateral Security Agreement*. (Hardiyanti, 2018)

Pada tahun 2017 Trump mengirim 4.000 tentara tambahan ke Afghanistan untuk menjaga keamanan di Afghanistan (VOA INDONESIA, 2017). Penambahan pasukan dikarenakan Taliban menyuarakan Operasi Mensouri yaitu penyerangan terhadap pasukan

asing, melalui operasi tersebut terlihat kekuatan kelompok Taliban semakin meningkat dengan keberhasilannya dalam mengambil alih distrik penting yang ada di Afghanistan. Pada saat bersamaan juga kekuatan baru datang yaitu ISIS yang semakin menambah konflik di Afghanistan. (Kertopati, 2017)

Tepat dua dekade invasi Amerika Serikat di Afghanistan, Presiden terpilih Joe Biden pada April 2021 secara mengejutkan menyatakan akan menarik seluruh pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan secara bertahap yaitu selambat-lambatnya hingga 31 Agustus 2021. Departemen Keamanan Amerika Serikat atau Pentagon menyatakan telah berhasil menarik seluruh pasukan militer Amerika Serikat pada tanggal 30 Agustus 2021 disertai evakuasi warga sipil kurang lebih 100.000 (CNN INDONESIA, 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa mengapa Amerika Serikat menarik seluruh pasukan militer dari Afghanistan pada tahun 2021?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah mengapa Amerika Serikat menarik seluruh pasukan militernya dari Afghanistan pada tahun 2021, penulis menggunakan satu teori, karena teori merupakan acuan untuk menganalisa mengapa suatu fenomena itu terjadi. Teori yang digunakan penulis dalam menganalisa fenomena penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan pada tahun 2021 adalah :

Teori Pilihan Rasional

Dalam pembuatan keputusan, Graham T. Allison memperkenalkan teori pilihan rasional yang di kategorikan menjadi 3 bagian :

1. Model Rasional Aktor

Model tersebut memandang politik luar negeri dari suatu negara sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional negara tersebut, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional negara tersebut. Pembuatan keputusan politik luar negeri tersebut dianalogikan sebagai proses intelektual, dimana individu dari pemerintahan negara tersebut menerapkan penalaran dengan menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Sehingga, unit analisa dari model pembuatan keputusan tersebut adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah (Mas'ood, 1990).

Dengan demikian analisis politik luar negerinya harus memperhatikan kepentingan nasional dan tujuan bangsa tersebut, dengan memperhitungkan untung-rugi dari alternatif-alternatif yang diambil oleh pemerintah. Dalam model ini digambarkan bahwa dalam mengambil pilihan atas alternatif-alternatif yang telah tersedia, pembuat keputusan atau aktor rasional menggunakan kriteria "optimalisasi hasil", dimana pembuat keputusan harus memperoleh informasi yang cukup sehingga dapat melakukan pertimbangan yang optimal terhadap semua alternatif atau opsi yang mungkin dilakukan dari semua sumber-sumber yang dipakai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Allison memiliki pandangan bahwa negara sebagai aktor rasional karena cenderung berpikir rasional untuk mencapai kepentingan nasional. (Mas'ood, 1990).

2. Model Proses Organisasi

Model ini memandang politik luar negeri sebagai hasil kerja organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan politik luar negerinya bukan saja melalui proses intelektual, tetapi lebih kepada proses mekanis yaitu pembuatan keputusan dilakukan secara mekanis yang merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu. Pola perilaku tersebutlah yang disebut prosedur kerja baku (standard operating procedure). Model proses organisasi mengajukan tiga proposisi, antara lain: pertama, suatu pemerintah harus terdiri dari sekumpulan organisasi-organisasi yang secara longgar bersekutu dalam struktur hubungan yang mirip struktur feodal. Kedua, keputusan dan perilaku pemerintah bukanlah hasil dari proses penepatan pilihan secara rasional, tetapi sebagai output atau hasil kerja organisasi-organisasi besar yang berkerja menurut suatu pola perilaku baku. Ketiga, setiap organisasi yang memiliki prosedur kerja rutin dan baku umumnya akan berlaku seperti perilaku sebelumnya. Sehingga, proses yang semi-mekanistik ini memengaruhi keputusan maupun penerapan keputusan tersebut. Model ini juga berpandangan bahwa politik luar negeri suatu bangsa harus diarahkan untuk menelaah unit analisa berupa output organisasi dan harus mengidentifikasikan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dan menunjukkan pola-pola perilaku organisasional yang memunculkan tindakan politik luar negeri tersebut.

3. Model Politik Briokratik

Dalam model ini politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual. Namun, politik luar negeri dipandang dari hasil proses interaksi, penyesuaian diri, dan perpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi. Dan pembuatan keputusan politiknya melalui proses sosial atau dalam kata lain proses politik. Dimana politik luar negeri muncul dari proses politik normal seperti tawar-menawar, kompromi, maupun penyesuaian diri. Sehingga, unit analisa dalam model ini adalah dilihat dari tindakan pejabat-pejabat pemerintahnya dalam hal menerapkan wewenang pemerintah yang bisa dirasakan oleh mereka yang berada diluarnya.

Dari tiga model pilihan rasional yang telah dipaparkan, Penulis dalam penelitiannya mengambil model rasional aktor dikarenakan konsep berpikir yang sederhana dan mampu menjelaskan perilaku negara berdasarkan kalkulasi untung dan rugi yang bersifat strategis dan sistematis. Oleh karena itu, model ini masih relevan untuk menganalisa perilaku suatu negara. Begitu pula untuk menganalisa perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam penarikan seluruh pasukan militernya dari Afghanistan. Berikut adalah pilihan beserta keuntungan dan kerugian yang dapat dijelaskan melalui tabel.

Tabel 1.3 1 Kalkulasi Untung Rugi Amerika Serikat dalam Kebijakan Penarikan Pasukan Militer dari Afghnistan pada Tahun 2021.

Pilihan	Keuntungan	Kerugian
Menerapkan Kebijakan Penarikan Pasukan Militer Amerika dari Afghnistan	<p>a. Anggaran invasi perang dapat direlokasi pada kepentingan domestik dan dapat di alokasikan ke wilayah yang lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat.</p> <p>b. Mengurangi ancaman krisis pasukan militer Amerika Serikat.</p> <p>c. Mempertahankan pengaruh Amerika Serikat di Kawasan Asia.</p>	<p>a. Merusak kredibilitas Amerika Serikat sebagai polisi dunia.</p> <p>b. Terancamnya kepentingan Amerika Serikat dalam mengontrol geopolitik Afghanistan</p>
Tidak Menerapkan Kebijkan Penarikan Pasukan Militer Amerika Serikat dari Afghanistan	<p>a. Amerika Serikat dapat mengontrol geopolitik Afghanistan.</p> <p>b. Terjaminnya kepentingan Amerika Serikat dalam ekspolari kekayaan alam Afghanistan.</p>	<p>a. Memperbanyak utang negara dalam pembiayaan pasukan militer di Afganistan</p> <p>b. Banyaknya pasukan militer Amerika Serikat gugur.</p>

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran teori aktor rasional dengan menggunakan kalkulasi untung rugi dalam pengambilan kebijakan, penulis berpendapat bahwa kebijakan Amerika Serikat dalam menarik pasukan militernya dari Afghanistan pada tahun 2021 dengan tujuan, antara lain:

1. Menjaga stabilitas ekonomi politik dalam negeri Amerika Serikat.
2. Mempertahankan *influence* Amerika Serikat di Kawasan Asia.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditentukan dari masalah yang diajukan dan inti dari tujuan penelitian berisikan tentang kontribusi hasil penelitian bagi kepentingan keilmuan. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui alasan rasional apa saja yang menyebabkan pemerintah Amerika Serikat di era kepemimpinan Joe Biden mengambil kebijakan luar negeri dengan menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah salah satu karya konseptual yang berlaku agar suatu karya tulis ilmiah dapat dipertanggung jawaban di hadapan ilmu pengetahuan dengan cara menganalisa data sesuai dengan tujuan yang dituju. Dalam perumusan penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research method*) yang berarti penulis menggunakan teori/konsep sebagai fokus penelitian. Adapun penelitian ini bersifat eskplanatoris yang bertujuan memberikan jawaban akan adanya kaitana antara variabel satu dengan faktor kasus lain. Teknik dalam penelitian ini mengambil dua cara yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. (Indrianto, 2019).

A. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan pengumpulan data studi pustaka. dengan cara mengidentifikasi dan menempatkan berbagai sumber yang menyediakan informasi aktual atau opini pribadi/ahli tentang suatu pertanyaan penelitian dan data yang digunakan oleh penulis merupakan data sekunder yang berarti penulis tidak berinteraksi langsung dengan objek yang dikaji. Rujukan pustaka yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diperoleh dalam

1. Repisetory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Buku koleksi pribadi
3. Media internet (*website*)

B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mempermudah penulis untuk mengolah informasi sehingga data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang ilmiah serta objektif. Ada pun teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif-kualitatif. Teknik tersebut akan membantu penulis untuk menggambarkan fenomena dan memahami fenomena tersebut lebih objektif.

G. Jangkauan Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan runtutan proses yang jelas dan benar. Untuk mendapatkan runtutan yang jelas dan benar diperlukan suatu ruang lingkup pembahasan. Dengan ditetapkannya ruang lingkup pembahasan, penelitian bisa lebih fokus pada kajian yang akan dianalisa dan mencegah analisa agar tidak terlampau luas dan tidak efektif dalam membahas kajian yang sebenarnya. Dalam ruang lingkup pembahasan terdapat dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1. Batasan Materi

Batasan materi dalam penulisan karya ilmiah berfungsi untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau objek yang akan dianalisa berdasarkan cakupan atau objek studinya. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan terhadap spenarikan pasukan militer Amerika Serikat pada tahun 2021. Dalam hal ini penulis melakukan analisa terhadap sikap Amerika Serikat dalam kebijakan luar negeri tersebut.

2. Batasan Waktu

Batasan waktu dalam suatu karya tulis ilmiah digunakan untuk lebih membatasi jangka waktu objek kajian yang akan diteliti supaya data-data yang digunakan oleh penulis

tetap sesuai dengan permasalahan yang dianalisa. Penulis akan menggunakan jangka waktu dari tahun 2001 sampai tahun 2021. Tahun 2001 menjadi awal jangka waktu yang ditetapkan karena pada tahun 2001 adalah awal mula perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dikarenakan terdapat penyerangan terhadap gedung yang melambangkan kesuksesan Amerika Serikat dalam hal politik maupun ekonomi yang di sebut dengan gedung *World Trade Center* dan hal tersebutlah isu keamanana menjadi isu global bagi setiap Negara. Sedangkan tahun 2021, penulis tetapkan karena pada tahun tersebut merupakan tahun dimana pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden memutuskan untuk menarik seluruh pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan. Namun dalam batasan waktu, penulis tidak menutup kemungkinan menggunakan waktu diluar batasan yang sudah ditetapkan selama masih sesuai dan memiliki kaitan dengan kajian yang diteliti oleh penulis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan poin – poin penting menjadi alasan - alasan dasar penulis dalam menyajikan tema atau judul sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam. Poin – poin penting yang akan dijabarkan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian (pengumpulan data dan analisis data), jangkauan penelitian (batasan materi dan batasan waktu) dan sistematika penulisan.

BAB II : Keterlibatan Amerika Serikat di Afghanistan

Bab ini, akan membahas keterlibatan Amerika Serikat di Afghanistan berawal dari hubungan Amerika Serikat dan Afghanistan, alasan keterlibatan Amerika Serikat menginvasi Afghanistan serta keterlibatan Amerika Serika di Afghanistan pada sektor keamanan, ekonomi, dan politik.

BAB III : Keuntungan Amerika Serikat dalam Penarikan Pasukan Militer dari Afghanistan

Bab ini akan memaparkan keuntungan Amerika Serikat dalam menarik mundur pasukan militernya pada tahun 2021 dari Afghanistan dengan mempertimbangkan keuntungan yang didapat Amerika Serikat.

BAB IV : Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari uraian yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya sekaligus menjadi bab penutup dari keseluruhan penelitian ini.